

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 < 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 < 90 %	Tinggi
3.	66 < 75 %	Sedang
4.	51 < 65 %	Rendah
5.	< 50 %	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96 %	121,49 %	126,55 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	79	84,43	106,87 %	Sangat Tinggi

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS 1**
**Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
bagi PPKS**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”** dengan sasaran **“Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan”**.

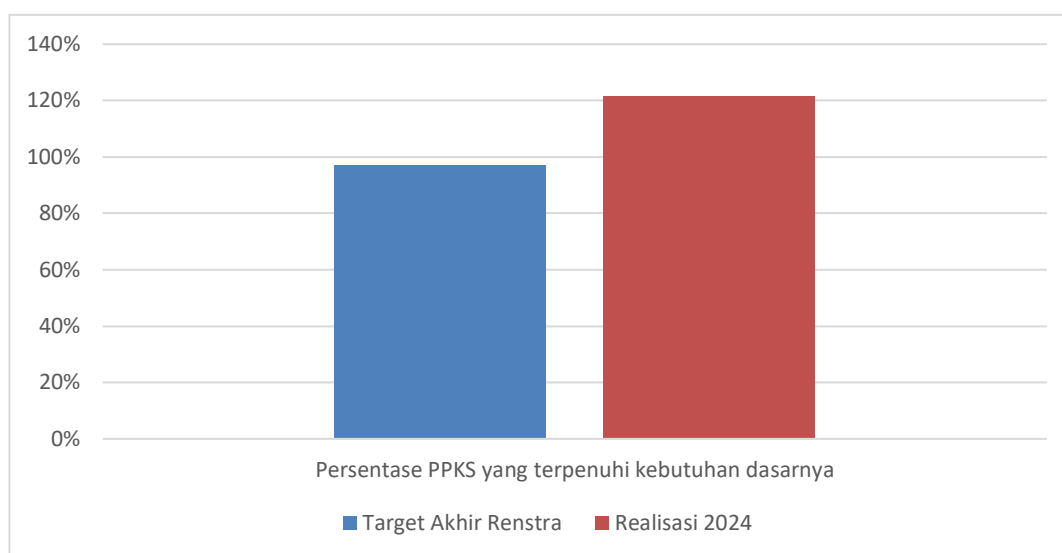
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	113,14 %	96 %	121,49 %	126,55 %	Meningkat

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	97 %	121,49 %	121,49 %



Gambar 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2024 sebesar 121,49% dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan Review Rencana Strategis II sebesar 96%. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan capaian kinerja 126,55% dengan predikat **sangat tinggi**. Realisasi Tahun 2023 juga sama tingginya dengan Tahun 2024 yaitu 113,14% dengan capaian 119,10% dengan predikat sangat tinggi. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan dengan baik yang selaras dengan sasaran strategis pada Dinas Sosial serta kerjasama yang baik antara pegawai, mitra kerja serta masyarakat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nasional / Provinsi	Kab. Gresik	Lebih Tinggi / Rendah
Misi : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik					
Tujuan : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan					
S.1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Provinsi : 104% Kementerian : 101,75%	121,49 %	Lebih Tinggi

Bila dibandingkan dengan capaian Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Sasaran Strategis pertama adalah meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 4 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti memiliki capaian 106% (2) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial yang meningkat fungsi sosialnya memiliki capaian 95,06% (3) Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial yang meningkat fungsi sosialnya memiliki capaian 117%, dan (4) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial penerima program penanganan bencana yang meningkat fungsi sosialnya memiliki capaian 153% dengan kata lain capaian sasaran strategis pertama memiliki kategori sangat tinggi. Sasaran Strategis kedua yaitu meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan sosial dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mendapatkan capaian 100% dengan kategori baik, maka capaian Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sama tingginya dengan kategori baik.

Pada Tahun 2024, Kementerian Sosial memiliki 4 sasaran strategis, yaitu : (1) meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan memiliki rerata capaian 101,75% dengan indikator pertama persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 99,39% dan realisasi 99,44% memiliki capaian 100,05%, indikator kedua persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial dengan target 90,13% dan realisasi 92,14% memiliki capaian 102,23%, indikator ketiga persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya dengan target 85% dan realisasi 87,41% memiliki capaian 102,83% (2) meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan memiliki rerata capaian 103,95% dengan indikator pertama persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan

DTKS yang memiliki target 70% dan realisasi 73,73% dengan capaian 105,33%, indikator kedua yaitu persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS dengan target 75% dan realisasi 76,92% dengan capaian 102,56% (3) meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki rerata capaian 107,53% dengan indikator persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional dengan target 86,5% dan realisasi 93,02% dan capaian 107,53% dan (4) meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial memiliki rerata capaian 105,71%. Maka capaian Kementerian Sosial mendapatkan predikat sangat tinggi sama dengan capaian Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan kategori baik.

**Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
Misi : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik				
Tujuan : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan				
S.1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	- Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat terkait penanganan PPKS - Tersalurkannya bantuan sosial bagi PPKS sesuai dengan hasil survey, verifikasi dan validasi data serta kebutuhan masing-masing PPKS - Terlaksananya pemberian pelatihan dan pembinaan bagi PPKS yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat agar penanganan dan pemberian bantuan bagi PPKS dapat maksimal

Indikator kinerja Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya memiliki 4 Program pendukung yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana.

Pada Program Pemberdayaan Sosial dilakukan pembinaan kepada mitra kerja Dinas Sosial, seperti TKSK, PSM, LK3, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan penanganan dan pelayanan serta pengentasan kemiskinan karena adanya pemanfaatan lembaga potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada.

Rapat Koordinasi Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial



Bimtek Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)



Koordinasi Karang Taruna dan Penyaluran Hibah



Sosialisasi dan Koordinasi LK3



Selain itu terdapat juga santunan kehormatan bagi Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu program Nawakarsa Bupati Gresik yaitu Gresik Seger dengan Output Kunci Gresik Santri. Target pemberian santunan untuk Marbot sebanyak 1.490 orang dengan realisasi 1.438 orang sebesar @ Rp. 200.000 dan target untuk Guru Ngaji sebanyak 7.615 orang dengan realisasi 7.366 orang sebesar @ Rp. 200.000. Terdapat juga santunan bagi Penjaga Makam dengan target 1.051 orang dan terealisasi sebanyak 1.038 orang @ Rp. 200.000,-. Santunan ini tidak dapat terealisasi seluruhnya dikarenakan pada saat penyaluran calon penerima ada yang tidak dapat ditemukan, meninggal dunia, pindah domisili, sudah tidak mengajar, tidak menjadi marbot, tidak menjadi penjaga makam, menolak, sudah mendapat bantuan lainnya, KPM Ganda serta NIK tidak cocok. Hal tersebut membuat realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Rencana yang akan dilakukan Tahun 2025 untuk meminimalisir tidak terserapnya santunan adalah dengan memastikan data penerima santunan valid yang sudah direkap dari akhir Tahun sebelum Tahun penyaluran dan pengajuan penyaluran bantuan dipersiapkan mulai dari awal tahun sehingga dapat tersalurkan semua tanpa pengembalian serta koordinasi yang baik dengan desa/kelurahan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan instansi terkait.

Pemberian santunan bagi Marbot, Guru Ngaji, Penjaga Makam



Program Rehabilitasi Sosial merupakan program yang berisi pemberian pembinaan, pelatihan dan bantuan serta rehabilitasi bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) seperti anak terlantar, lansia terlantar, tuna susila, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas, Gelandangan dan Pengemis. Pengiriman PPKS ke UPT milik Provinsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPKS, seperti anak yang bermasalah mendapatkan pelatihan dengan dikirim ke UPT PSPA (Pelayanan Sosial Petirahan Anak) Batu untuk melatih kemandirian anak tersebut dan Anak Putus Sekolah dikirim ke UPT PSBR (Pelayanan Sosial untuk Remaja Bermasalah dan Putus Sekolah) Bojonegoro. Pelatihan di UPT PSBR Bojonegoro bertujuan untuk melatih kemandirian anak dan melatih keterampilan anak sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Keterampilan tersebut seperti menjahit, membordir, mesin dan otomotif. ODGJ akan dirujuk ke RSJ Menur sebagai pusat rehabilitasi bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan Puskesmas.

Penanganan PPKS



Pengiriman Petirahan Anak



Selain itu, pada Program Rehabilitasi Sosial juga terdapat fasilitasi untuk pengajuan Adopsi Anak. Dinas Sosial memberikan pelayanan untuk pengajuan adopsi anak sesuai dengan persyaratan yang ada mulai dari verifikasi kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak, *Home Visit* (kunjungan rumah) untuk membuat Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak sesuai dengan hasil kunjungan (*Home Visit*) dan diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Jawa Timur untuk pencatatan data dan apabila disetujui maka akan dibuatkan Ijin Pengangkatan Anak dan dibawa ke Pengadilan beserta semua berkas persyaratan Asli. Setelah Penetapan Pengadilan maka berkas dikirim ke Dinas Sosial Provinsi untuk pencatatan data dan melaporkan perkembangan anak setiap 1 Tahun sekali.

Sosialisasi Prosedur Adopsi Anak dan Penyerahan Dokumen Adopsi



Pada program Rehabilitasi Sosial juga melakukan pemberian bantuan berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu, tangan palsu dan peralatan keterampilan/usaha, pemberian fasilitasi kartu kependudukan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pada Tahun 2024, Dinas Sosial mengadakan kegiatan

pelatihan keterampilan membuat batik yang bertepatan dengan Hari Batik Nasional bekerja sama dengan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik guna meningkatkan kemampuan khusus dan melestarikan budaya Khas Gresik. Dinas Sosial juga mendapatkan CSR dari Pertamina “Pertamina Sahabat Difabel” berupa bantuan peralatan dan perlengkapan bengkel.

Pemberian bantuan bagi Penyandang Disabilitas



Asesment Lansia dan Penyandang Disabilitas



Program rehabilitasi sosial terdapat bantuan sosial bagi Janda Miskin dan Anak Yatim sebesar @ Rp. 200.000 dengan target sasaran Janda Miskin sebanyak 18.252 orang dan realisasi 17.799 orang sedangkan target sasaran untuk Anak Yatim sebanyak 4.872 dan realisasi 4.674 orang. Hal tersebut dikarenakan pada saat penyaluran calon penerima ada yang tidak dapat ditemukan, meninggal dunia, pindah domisili, menolak, sudah mendapat bantuan lainnya, KPM Ganda serta NIK tidak cocok. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya adalah menggunakan data yang berasal dari usulan desa/kelurahan dan sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pengambilan bantuan bagi KPM yang memiliki kesulitan dalam mengakses ke tempat pengambilan dapat diubah dengan metode kunjungan ke rumah oleh PT. POS. Untuk KPM yang mengalami kendala dan halangan saat waktu pengambilan bantuan, saat ini dapat diwakilkan oleh orang dalam 1 Kartu Keluarga (KK) maupun berbeda KK asalkan satu nasab dengan Ayah maupun Ibu, dibuktikan dengan keterangan dari Desa. KPM yang tidak mengambil uang bantuan maksimal dari waktu yang ditentukan, wajib diantar ke rumah langsung oleh PT. POS agar bantuan dapat tersalurkan semua ke KPM.

Penyaluran bantuan bagi Janda Miskin dan Anak Yatim



Program ini juga terdapat indikator kegiatan yaitu Nilai Kabupaten Layak Lansia mengingat Dinas Sosial ikut serta dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi Lansia. Target Tahun 2024 adalah 78 dan realisasi penilaian 89,70. Dalam proses pelaksanaannya untuk mendukung kegiatan Nilai Kabupaten Layak Lansia, Dinas Sosial bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan RSUD Ibnu Sina Gresik mengadakan kegiatan Operasi Katarak Gratis. Terdapat juga pemberian bantuan bagi Lansia berupa alat bantu yang dapat digunakan untuk memudahkan akses bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan bantuan permakanan untuk 50 orang Lansia di Kecamatan Bungah.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan program yang berisi tentang bantuan kepada fakir miskin seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), rekomendasi bantuan kesehatan (PBI JKN, KIS dan KGS), verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pembinaan bagi anak di Panti Asuhan. Selain itu juga terdapat Program Nawa Karsa Gresik Seger dengan Output Kunci PKH Inklusif yaitu pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas dan Lanjut Usia yang diberikan secara 4 tahap @ Rp. 500.000,- dengan target sasaran penerima sebanyak 4.058 orang dan realisasi sebanyak 1.354 orang.

Hambatan yang dihadapi pada penyaluran adalah pada proses verifikasi data adanya data ganda, calon penerima bantuan sudah menerima bantuan lain, meninggal dunia, pindah domisili dan menolak bantuan karena sudah mampu. Bantuan Sosial PKH Inklusif Tahun 2024 banyak yang tidak terserap dikarenakan terdapat tambahan pada saat PAPBD namun waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan proses penyaluran bantuan sehingga tidak dapat disalurkan. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya adalah verifikasi data dan persiapan pengajuan penyaluran bantuan dilaksanakan awal tahun agar bantuan PKH Inklusif tepat sasaran dengan melibatkan desa dan pendamping sosial dengan fokus utama adalah Lanjut Usia dan penyandang disabilitas yang belum pernah menerima bantuan sosial.

Pada program ini juga mendapatkan tambahan anggaran yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada komponen masyarakat yang meliputi pekerja pabrik rokok, pekerja

pabrik rokok yang mendapat PHK, buruh tani tembakau, serta masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dengan target sasaran 3.157 orang x 4 kali @ Rp. 500.000 dengan realisasi sebanyak 2.866 orang.

Pada proses penyalurannya terdapat beberapa hambatan terutama pada data. Strategi yang dilakukan untuk tahun berikutnya yaitu memulai pendataan di awal tahun sehingga penyaluran bantuan sesuai jadwal, tepat sasaran dan tidak ada pengembalian. Program Nawa Karsa lainnya yang diampu oleh Dinas Sosial yaitu Gresik Seger dengan Output Kunci Gresik Satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik). Dinas Sosial bekerja sama dengan Desa untuk melakukan verifikasi, validasi serta pemutakhiran data, dimana pada setiap desa terdapat operator SIKS-NG.

Sosialisasi Pemutakhiran DTKS



Penyaluran PKH Inklusif



Penyaluran DBHCHT



Program Penanganan Bencana merupakan program yang berisi penanganan korban baik bencana alam maupun sosial dengan kegiatan seperti membuka dapur umum pada saat banjir melanda beberapa wilayah di Kabupaten Gresik. Tim Tagana dan dibantu oleh TKSK membuka dapur umum serta memberikan bantuan seperti selimut dan tenda pada saat banjir melanda terutama di wilayah Kecamatan Benjeng, Balongpanggang dan Cerme. Pada Tahun 2024 terdapat bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Gresik terutama wilayah Kepulauan Bawean yang terdampak. Dinas Sosial memberikan dukungan psikososial bagi anak korban bencana alam dan memberikan bantuan sembako. Selain itu ada juga pemulangan Orang Terlantar dengan bekerja sama dengan Kepolisian dan Penanganan Mr. X (Jenazah tanpa identitas) dengan bekerja sama dengan RS Ibnu Sina Gresik. Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra kerja Dinas Sosial dalam penanganan bencana diberikan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas mengingat tugas Tagana memiliki peran penting pada saat adanya bencana dan harus selalu siaga.

Kegiatan memberikan Bantuan untuk Korban Bencana



Keberhasilan program yang mendukung sasaran strategis 1 ditunjukkan dengan terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial dengan baik seperti program rehabilitasi sosial yang sudah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan mitra kerja, masyarakat, instansi terkait yang menangani masalah sosial dan perusahaan di sekitar dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta diperlukannya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaporkan PPKS yang ada di daerahnya yang memerlukan penanganan. Selain itu tersalurkannya bantuan-bantuan sosial kepada fakir miskin sehingga mereka lebih sejahtera dan mandiri yang terdapat pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menjadi faktor pendukung tercapainya sasaran strategis 1. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH juga memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, karena pendamping PKH secara langsung memantau perkembangan penerima manfaat sesuai dengan pembagian tugas. Begitu pula dengan penyaluran BPNT yang juga melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) pada setiap Kecamatan. Verifikasi data digunakan untuk memperbarui data Fakir Miskin yang ada dan saling berhubungan dengan

penerima bantuan sosial guna pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial yang juga menjadi tempat bagi Anak Fakir Miskin atau Anak Terlantar dan Lanjut Usia juga mendapatkan pembinaan dan bantuan. Keberhasilan dalam setiap sub kegiatan yang ada pada Dinas Sosial tidak luput dari kerja sama dan koordinasi yang baik dari pegawai Dinas Sosial maupun lembaga yang berkaitan langsung serta peran masyarakat. Keberhasilan Program Pemberdayaan didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antara pegawai Dinas Sosial dan mitra kerja Dinas Sosial yang disebut dengan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) meliputi TKSK, LK3, Forum LKS, Pendamping PKH, Tagana, Karang Taruna, PSM sehingga pembinaan dan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial bisa maksimal dan aktif berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak luput dari bimbingan dan pembinaan dari Dinas Sosial dan upaya pembinaan secara terus menerus masih dibutuhkan untuk meningkatkan peran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu korban bencana alam dan sosial juga merupakan salah satu jenis PPKS yang harus ditangani oleh Dinas Sosial. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial telah melakukan penanganan pertama terhadap korban banjir dan gempa bumi berupa Dapur Umum dan bantuan logistik melalui Program Penanganan Bencana yang didukung oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra kerja Dinas Sosial.

Hambatan yang ada yaitu jumlah PPKS masih banyak disebabkan oleh kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi. Sarana dan prasarana untuk menunjang penanganan masalah kesejahteraan sosial juga harus ditingkatkan begitu juga dengan fasilitas dan pelayanan publik sehingga memudahkan PPKS untuk mengakses fasilitas dan layanan publik yang ada. Selain itu, pembinaan secara berkelanjutan pada PPKS tersebut masih sangat dibutuhkan mengingat masih kompleksnya permasalahan sosial sehingga bisa bersama-sama menangani PPKS yang ada di Kabupaten Gresik.

**SASARAN
STRATEGIS 2**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik” dengan sasaran “Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan”.

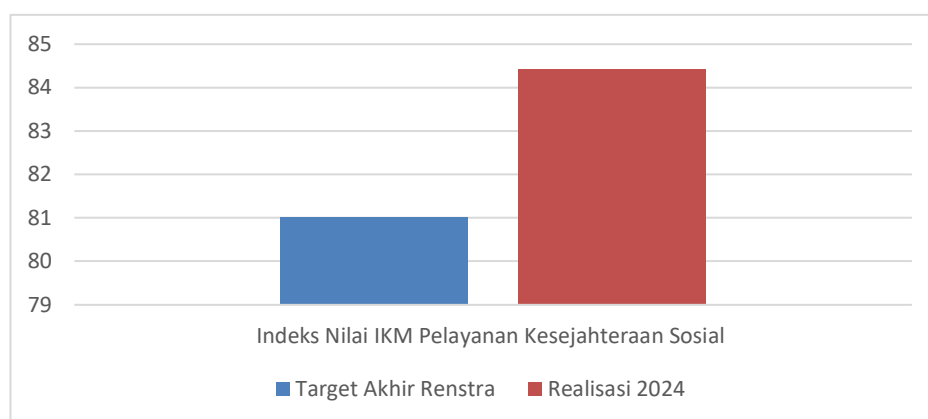
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	86,54	79	84,43	106,87 %	Menurun

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	81	84,43	84,43



Gambar 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 sebesar 84,43 dari target yang telah ditetapkan sebesar 79. Nilai tersebut turun dari Tahun 2023 namun masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran dengan indikator tersebut maka capaian kinerja 106,87% dengan predikat **sangat tinggi**. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial dengan baik serta kerjasama yang baik antara pegawai, mitra kerja serta masyarakat. Indikator kinerja Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial memiliki 2 Program pendukung yaitu Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nasional / Provinsi	Kab. Gresik	Lebih Tinggi / Rendah
Misi : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik					
Tujuan : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan					
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kementerian : 105,71%	106,87 %	Lebih Tinggi

Pada Tahun 2024, Kementerian Sosial memiliki 4 sasaran strategis, yaitu : (1) meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan memiliki rerata capaian 101,75% (2) meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan memiliki rerata capaian 103,95% (3) meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki rerata capaian 107,53% (4) meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial memiliki rerata capaian 105,71% dengan 2 (dua) indikator yaitu nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial dengan target 90% dan realisasi 90,52% dengan capaian 100,58% dan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang memiliki target nilai 78 dan realisasi 86,46 dengan capaian 110,85%. Maka capaian Kementerian Sosial mendapatkan predikat sangat tinggi sama dengan capaian Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan kategori baik.

**Tabel 3.10 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
Misi : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik				
Tujuan : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan				
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	- Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat - Puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengisi survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berisi penunjang terlaksananya Program dan Kegiatan

yang ada pada Dinas Sosial mulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran, Sarana dan Prasarana, Gaji dan Tunjangan ASN dan honor Non ASN, serta rapat koordinasi agar kualitas SDM pegawai Dinas Sosial meningkat dan tujuan sasaran dapat tercapai sesuai target.

Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial

BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga November 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Gresik dari Tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, ini bisa kita lihat dari grafik nilai SKM Dinas Sosial. Untuk Tahun 2023 semester I 86,95% semester II 86,51% sedangkan pada Tahun 2024 semester I mengalami penurunan sebesar 84,28%. Sedangkan pada semester II mengalami sedikit kenaikan sebesar 84,43%.
2. Terjadinya Peningkatan Nilai SKM pada Semester II Tahun 2024 dapat dilihat dari 9 Unsur SKM ada 1 unsur yang mengalami peningkatan yaitu dari unsur pengaduan. Dari unsur pengaduan mengalami peningkatan dapat dilihat dari respon yang baik dari pegawai dinas sosial dalam menerima pengaduan dari masyarakat.
3. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk unsur yang mendapatkan kenaikan nilai yang lebih baik. Agar Kualitas Layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik tetap mendapatkan predikat baik untuk masyarakat.

Gresik, 15 November 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP.19740825 200604 2 016

Kabupaten Gresik memiliki 11 TMP, Dinas Sosial memiliki Program Pengelolaan TMP dimana pada program tersebut dilakukan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) terutama yang terletak di wilayah Kota seperti Taman Makam Pahlawan di Jl. Pahlawan dan TMP Randuagung. TMP Kota sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dengan baik. Selain itu TMP di Kecamatan juga harus selalu terjaga kebersihannya sehingga tetap terpelihara dengan baik. Hal tersebut

menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, ada kegiatan untuk menghormati para legium veteran dan perintis kemerdekaan dan kegiatan untuk peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan Dinas Sosial mengadakan diskusi kebangsaan yang dihadiri oleh siswa-siswi SMA, anggota TNI dan Legium Veteran.

Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Keperintisan Sosial



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96 %	121,49 %	126,55 %	25.738.821.755	18.557.747.127	72,10 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	79	84,43	106,87 %	6.031.171.539	5.675.664.110,01	94,11 %

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran *i*

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran *i*

CK_i : Capaian Keluaran *i*

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	126,55 %	72,10 %	43,03%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	106,87 %	94,11 %	11,94%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS” terdapat efisiensi sebesar 43,03% dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial” terdapat efisiensi sebesar 11,94 %. Sasaran strategis ini didukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Secara umum efisiensi berupa pengembalian bantuan sosial, sisa kontrak pengadaan, perjalanan dinas, belanja dapur umum untuk korban bencana, makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta dan belanja pemeliharaan kendaraan.

Adanya efisiensi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terjadi karena penyerapan anggaran disesuaikan oleh kebutuhan. Seperti pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, terdapat efisiensi dikarenakan adanya jabatan yang kosong. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sisa kontrak dari pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, penyediaan bahan logistik (mamin) kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta pemeliharaan kendaraan yang memiliki efisiensi karena disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

Pada Program Rehabilitasi Sosial efisiensi dikarenakan adanya sisa kontrak pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pengembalian bantuan sosial bagi janda miskin dan anak yatim, belanja bahan cetak, honor narasumber, belanja jasa tenaga penanganan sosial, perjalanan dinas, honor peserta dan belanja makanan dan minuman rapat.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat efisiensi berupa perjalanan dinas dan pengembalian bantuan sosial PKH Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas serta DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, perjalanan dinas dan honor peserta rapat .

Untuk Program Penanganan Bencana terdapat efisiensi belanja bahan untuk pendirian Dapur Umum dikarenakan belanja bersifat kondisional tergantung pada kondisi bencana yang ada dan tidak dapat diprediksi.

Pada program Pemberdayaan Sosial terdapat efisiensi berupa pengembalian santunan bagi marbot, guru ngaji dan penjaga makam serta belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta rapat dan belanja perjalanan dinas.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdapat efisiensi belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta rapat dan belanja perjalanan dinas.